

**Judul** : Mencegah Degradasi Pancasila  
**Tanggal** : Jumat, 19 Juni 2020  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 6

## Mencegah Degradasi Pancasila

**Umbu TW Pariangu**  
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

**S**ETELAH menuai protes dari berbagai kalangan, pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan DPR akhirnya ditunda pembahasannya oleh pemerintah. Sikap tegas pemerintah tersebut sudah benar.

Seperti *Editorial Media Indonesia* (17/6) 'Demi Eksistensi Pancasila', pembahasan tersebut tidak tepat momen dan urgensi.

Penyederhanaan Pancasila menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan yang berkebudayaan (Pasal 7, ayat 2), yang kemudian diekstraksi lagi menjadi gotong royong (Pasal 7 ayat 3) dianggap potensial mendemistifikasi Pancasila sebagai pandangan hidup integral bangsa.

Kata "ketuhanan berkebudayaan" juga terkesan rancu, seolah-olah mendiskualifikasi esensi ketuhanan sebagai identitas religiusitas masyarakat. Selain itu, tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dalam materi RUU HIP itu juga bisa dianggap sebagai sikap anakronistik dalam kaitannya dengan menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi penuntun perjalanan hidup bangsa ini.

Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi final. Penegasan ini menjadi 'aman' membangun konstruksi berbangsa dan bernegara di

tengah berbagai upaya untuk mendegradasi fondasi konstitusionalitas kita.

Berbagai aksi yang berintensi menggantikan Pancasila merupakan tantangan yang harus disikapi dengan tegas oleh seluruh elemen bangsa (pemimpin, para elite tokoh kunci, hingga masyarakat). Dan ini lebih urgen untuk dijadikan sebagai orientasi pemraktikan nilai Pancasila ke depan ketimbang berdebat soal struktur makna Pancasila tersebut.

### Keteguhan profetik

Sekurang-kurangnya ada tiga hal mendasak yang perlu dimaknai dalam meneguhkan nilai-nilai fundamen Pancasila dalam penghayatan dan pengamalannya. Pertama, keteguhan profetik seluruh elemen bangsa memperjuangkan kebenaran dan dasar bernegara Indonesia.

Pancasila merupakan nilai dasar yang perlu terus dipertahankan dan dirayakan pencarian intisariannya oleh setiap manusia untuk membebaskannya dari penafsiran parsial dalam menciptakan relasi antarwarga yang humanis, berbasis pada kebajikan sosial.

Di zaman Niccolo Machiavelli (1469-1527) misalnya, kekuasaan dianggap sebagai *centre of universe* dari keseluruhan prosedur tatanan kenegaraan. Nilai-nilai tersebut juga yang kemudian diwariskan rezim Orde Baru yang menyebabkan kekuasaan mengokupasi Pancasila. Pancasila tak lebih sebagai candu moral dalam berbagai

aktivitas penataran, kuliah, dan seminar.

Selama itu, kekuasaanlah yang memegang kendali bagaimana 'moralitas' nilai Pancasila ditegakkan dan dikenakan sebagai ikat pinggang dalam bernegara. Itu karena kekuasaan dianggap sebagai sumber legitimasi kebenaran yang absolut.

Padahal, kekuasaan bukanlah representasi absolut dari kebenaran, bahkan Lord Acton mengatakan *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*, bahwa kekuasaan yang tak terbatas akan melahirkan tabiat korup (perilaku menyimpang) tak terbatas pula.

Karena itu, kekuasaan harus dibatasi pengendalian diri berdasarkan prinsip-prinsip inklusifitas, solidaritas, empati, dan kerja sama yang dipedagogi peranti sakral Pancasila. Maka mendefinisikan kebenaran dalam perspektif kekuasaan yang demokratis hanya dapat dimungkinkan sejauh nilai-nilai perbedaan dapat didialogkan secara setara, tanpa terjadi dikotomisasi yang menegasi pelaksanaan hak-hak menjalankan prinsip keyakinan antarsesama sebagaimana spirit dari suatu bangsa yang pancasilais.

Di sinilah ruang demokrasi yang subtil terbangun, tatkala kekuasaan (negara) misalnya, mampu melegitimasi dan memberikan ruang toleransi bagi setiap pemeluk agama beribadah. Termasuk, melakukakan pencerahan religi di dalam interaksi kehidupan berbangsa, dan menghindari intimidasi terhadap ekspresi keagamaan.

Di tengah ancaman mudurnya toleransi dan ke-



setiakawanan sosial yang mendera bangsa, negara (baca: pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia) sudah

saatnya hadir secara tegas untuk menyelamatkan hak-hak rakyat dari berbagai pelecaban minoritas sehingga

persoalan dan penderitaan rakyat.

### Budaya inklusif

Ketiga, pentingnya peran pemerintah menularkan budaya dialog inklusif di antara pemuka agama, akademisi, kaum cendekiawan, LSM, tokoh masyarakat. Kita memerlukan sebuah panduan kolektif terutama dari para pemuka, masyarakat, soal bagaimana menempatkan wilayah agama sebagai ruang netral, dengan tidak mengontaminasi politik dengan panji-panji rasialisme, dll.

Ketimbang membahas HIP, elite-elite politik di DPR seharusnya lebih fokus mendialogkan secara intens dan tulus dengan rakyat bagaimana mewujudkan sistem dan mekanisme politik yang demokratis dan menjamin lahirnya wakil rakyat dan pemimpin Indonesia yang berintegritas, berempati dengan rakyat.

Termasuk, elite yang berrvisi integrator, menyatukan berbagai perbedaan identitas di masyarakat dalam satu payung sakral, Pancasila.

Segala rekayasa politik dan pemaksaan kehendak, yang mengabaikan diskursus publik justru menahan laju bangsa ini 'naik level' menjadi negara berdaulat. Sebagaimana lirik lagu Darrion, 'To fight for the right, without question or pause. To be willing to march into hell, for a heavenly cause' (Joe Darrion dalam *Man of La Mancha*, 1972).

Kita berdoa, semoga elite pemimpin bersama rakyat tak jemu-jemu berjuang membudayakan makna Pancasila. Bahkan, rela masuk 'api penyucian', melawan ancaman dan tantangan menegakkan kebinnekaan dari virus-virus pemecah belah kebangsaan. Amoralitas kekuasaan, pada akhirnya mereganghurga (kekuasaan), keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.